



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : BIII26-30/V 40-6/99

Jakarta, 19 Februari 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Bahan Penyusunan Kebutuhan ASN TA 2021

Kepada

Yth 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
di
Tempat

1. Menindaklanjuti surat kami Nomor BIII26-30/V3-9/99 tanggal 8 Januari 2020 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi mengucapkan terima kasih atas apresiasinya telah menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan ASN tahun 2021. Adapun nama-nama instansi yang telah menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan ASN adalah sebagaimana terlampir.
2. Permohonan penyusunan kebutuhan ASN dimaksud, bertujuan untuk mengetahui jumlah dan jenis jabatan sesuai skala prioritas yang dibutuhkan organisasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta sebagai bahan mempermudah dalam menyusun pertimbangan teknis secara nasional.
3. Perlu kami sampaikan pula bahwa Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi akan melaksanakan verifikasi dan validasi penyusunan kebutuhan yang rencananya akan diselenggarakan pada Maret 2020, di Kantor BKN Pusat Jakarta.
4. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat

Perencanaan Kepegawaian dan Formasi,


Ojak Murdani, S.Sos, MAP
NIP.19711210 199803 1001

Tembusan Yth:

Kepala BKN, sebagai laporan;

**Daftar Instansi Yang Telah Menyampaikan
Penyusunan Kebutuhan Tahun 2021**

No	Nama Instansi
1	Badan Informasi Geospasial
2	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
4	Badan Pemeriksa Keuangan
5	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6	Badan Pusat Statistik
7	Kementerian Dalam Negeri
8	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
9	Kementerian Keuangan
10	Kementerian Komunikasi dan Informatika
11	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
13	Lembaga Administrasi Negara
14	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
15	Prov. Kalimantan Timur
16	Prov. Sulawesi Tengah
17	Prov. Sumatera Barat
18	Kab. Balangan
19	Kab. Bandung
20	Kab. Empat Lawang
21	Kab. Garut
22	Kab. Gunung Kidul
23	Kab. Halmahera Utara
24	Kab. Hulu Sungai Selatan
25	Kab. Indragiri Hulu
26	Kab. Jember
27	Kab. Kapuas Hulu
28	Kab. Karimun
29	Kab. Kepulauan Anambas
30	Kab. Langkat
31	Kab. Lingga
32	Kab. Maluku Barat Daya
33	Kab. Mamuju Tengah
34	Kab. Morowali
35	Kab. Morowali Utara
36	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
37	Kab. Padang Lawas
38	Kab. Pandeglang
39	Kab. Pasaman Barat
40	Kab. Penajam Paser Utara
41	Kab. Rejang Lebong
42	Kab. Seram Bagian Timur
43	Kab. Solok Selatan
44	Kab. Soppeng
45	Kab. Sumbawa
46	Kab. Sumedang
47	Kab. Tabanan

No	Nama Instansi
48	Kab. Tanah Bumbu
49	Kab. Tanah Laut
50	Kab. Tasikmalaya
51	Kab. Temanggung
52	Kab. Wakatobi
53	Kota Banda Aceh
54	Kota Banjar
55	Kota Batam
56	Kota Binjai
57	Kota Bontang
58	Kota Depok
59	Kota Gunung Sitoli
60	Kota Langsa
61	Kota Mataram
62	Kota Padangsidempuan
63	Kota Pagar Alam
64	Kota Samarinda
65	Kota Semarang
66	Kota Tangerang Selatan
67	Kota Tanjungpinang

Kepala Pusat

